
MELAYU ISLAM BERAJA: IDENTITAS NASIONAL BRUNEI DARUSSALAM

Maitsa Hanifa Setyadi

maitsahs@gmail.com

Universiti Malaya, Kuala Lumpur

ARTICLE INFO

Keyword:

Brunei Darussalam,
Melayu, Islam Beraja,
history, citizenship,

ABSTRACT

Brunei Darussalam is the only country that maintains the form of an absolute monarchy in Southeast Asia, after independence from British colonialism. This form of government cannot be separated from the strong influence of an Islamic kingdom that upholds Malay customs. This research will look at the history of the formation of Brunei Darussalam's identity, starting from the history of the state of Brunei Darussalam, the establishment of the Melayu Islam Beraja identity, to the dynamics between the government and its people. Research was carried out using historical methods consisting of data collection processes (heuristics), data validation (critic), interpretation, and historiography. The results of the research show that in the course of the country's history, it was not only Bruneian Malays or Muslims who became the people of Brunei. The state has made adjustments such as holding citizenship tests with ease for those who are Muslim. For cosmopolitan communities, this treatment may be considered discriminatory. However, this step is in fact still being implemented and has been proven to be able to maintain the stability of the country, both politically and economically.

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Brunei Darussalam,
Melayu, Islam Beraja,
sejarah, kewarganegaraan,

ABSTRACT

Batik Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara yang mempertahankan bentuk monarki absolut di Asia Tenggara, setelah merdeka dari penjajahan Inggris. Bentuk pemerintahan ini tidak lepas dari kuatnya pengaruh kerajaan yang bercorak Islam dengan memegang teguh adat Melayu. Penelitian ini akan melihat sejarah pembentukan identitas Brunei Darussalam, mulai dari sejarah negara Brunei Darussalam, penetapan jati diri Melayu Islam Beraja, hingga dinamika antara pemerintah dengan masyarakatnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari proses pengumpulan data (heuristik), validasi data (kritik), interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perjalanan sejarah negara tersebut, memang tidak hanya orang Melayu Brunei atau orang Islam saja yang menjadi rakyat Brunei. Negara telah menetapkan penyesuaian seperti diadakannya ujian kewarganegaraan dengan kemudahan bagi mereka yang beragama Islam. Bagi masyarakat kosmopolitan, perlakuan ini boleh jadi dianggap diskriminatif. Bagaimanapun, langkah ini nyatanya tetap diberlakukan dan terbukti dapat menjaga kestabilan negara, baik secara politik maupun ekonomi.

PENDAHULUAN

Brunei merupakan satu-satunya negara monarki absolut di Asia Tenggara¹. Di masa modern, negara ini menjadi salah satu negara yang berhasil kembali ke bentuk asalnya setelah mengalami berbagai penaklukan dan kolonialisme. Brunei mampu mempertahankan nilai-nilai tradisional yang sudah digunakan sejak awal berdiri dengan tetap menyesuaikan konteks zaman. Tradisi Melayu lama yang merupakan tradisi awal tetap dipertahankan hingga kini. Hal ini memperkuat posisi etnis Melayu, terutama Melayu Brunei, dalam membentuk identitas nasional dan menjalankan pemerintahan.

Selain etnis Melayu, Islam sebagai agama negara juga memiliki peran penting di Brunei. Identitas agama Islam dalam bernegara sudah ditetapkan sejak deklarasi kemerdekaan pada 1 Januari 1984. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa Brunei bukan merupakan negara sekuler, melainkan negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Identitas nasional yang terbentuk dengan mengedepankan satu identitas kelompok tertentu seperti etnis atau agama pernah dikemukakan Brown dalam *The State and Ethnic Politics in Southeast Asia*:

The state also provides legitimation for the power structure in the form of a more or less explicit nationalist ideology, and this state-promulgated national identity defines the ideological parameters within which ethnic consciousness develops and operates. Since both cultural state nationalism and ethnic ideology employ the same type of cultural markers (race, language, religion and territory) in depicting the respective communities, then ethnic ideology must necessarily define itself as a reaction to, or a constituent of, the state-national ideology².

Teori tersebut menunjukkan kuatnya pengaruh negara untuk menggunakan identitas tertentu sebagai identitas nasional. Dalam konteks ini, Brunei memiliki satu falsafah nasional yang secara jelas membawa unsur identitas etnis, agama, dan negara, yakni Melayu Islam

¹ Maymunah, Jihan, and Asep Yudha Wirajaya. "UNSUR-UNSUR HISTORIOGRAFI TRADISIONAL ISLAM DALAM TEKS SALSILAH KETURUNAN RAJA-RAJA BRUNEI DAN SISTEM PEMERINTAHAN BRUNEI SAAT INI." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 4.2 (2020): 189-197

² Brown, David. 1996. *The State and Ethnic Politics in South East Asia*. London: Routledge, h. 2

Beraja. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai identitas nasional Brunei Darussalam. Pembahasan akan dimulai dari sejarah negara tersebut, Melayu Islam Beraja sebagai identitas dan falsafah negara, hingga implementasi rekonstruksi identitas tersebut di antara masyarakat dan negara.

METODE PENELITIAN

Kajian ini adalah kajian yang meliputi empat tahapan kerja secara sistematis, yaitu: heuristik: menelusuri data kepustakaan yang relevan dengan Melayu Islam Beraja sebagai identitas nasional Negara Brunei Darussalam (MIB); kritik sumber yakni melakukan penelaahan terhadap sumber yang digunakan dalam kajian mengenai MIB sebagai identitas nasional masyarakat Brunese Darussalam; interpretasi terhadap data-data yang telah dikumpulkan dan historiografi atau penulisan hasil kajian dalam bentuk artikel.

HASIL PENELITIAN

Sejarah Brunei Darussalam

Brunei Darussalam terletak di bagian utara Pulau Kalimantan, berbatasan dengan Laut Cina Selatan di bagian utara, serta dikelilingi wilayah Sarawak, Malaysia Timur. Wilayah ini dulunya termasuk daerah yang bergantung pada kekuasaan Majapahit. Pada abad ke-15, Islam mulai dikenal di wilayah ini. Kemudian Brunei menjadi kekuatan besar dan tidak lagi bergantung pada kekuatan negara lain pada awal abad berikutnya. Pengaruhnya tersebar hingga ke wilayah bagian selatan Filipina. Pada akhir abad ke-16, kekuatan Brunei mulai goyah. Portugis mulai datang untuk berdagang dan menyebarkan agama Katolik. Dua kali penyerangan di Kota Brunei dilancarkan oleh Spanyol yang pada masa itu hendak menguasai wilayah Filipina. Kemudian wilayah Brunei diambil alih oleh Belanda dan Inggris. Pada 1814, Sarawak berada di bawah kekuasaan James Brooke. Kota Brunei dijadikan pasar budak. Selanjutnya pada 1877, seluruh bagian utara Kalimantan dikuasai oleh Inggris, atau yang disebut *British North Borneo*. Brunei menjadi wilayah protektorat Inggris³. Tahun 1906, Inggris membentuk residensi di Brunei dan ini menyelamatkan kesultanan dari ancaman pelenyapan.

³Hasan, Sabiha. "Brunei: The New Independent State" dalam *Pakistan Horizon*, Vol. 37, No. 2, Second Quarter, 1984, hal. 72-73

Pertengahan abad ke-20 menjadi babak baru bagi Brunei dengan masuknya Jepang. Jepang menguasai wilayah Brunei pada Desember 1941 sampai Juni 1945. Selanjutnya kekuasaan kembali berpindah pada militer Inggris. Pada 1948-1959, posisi Brunei menjadi satu dengan pemerintahan Sarawak. Hingga pada 1959 Brunei membentuk pemerintahan terpisah secara administrasi dan mempunyai konstitusi sendiri. Hal tersebut semakin memperkuat posisi sultan yang saat itu dibantu lima orang dewan, termasuk dewan keagamaan. Islam ditetapkan menjadi agama negara. Britania Raya bertanggung jawab dalam hal pertahanan dan hubungan eksternal, sedangkan British High Commissioner bertanggung jawab dalam kebijakan internal⁴. Memasuki dekade 1960-an, Brunei dihadapkan pada pilihan untuk lepas dari Inggris dan bergabung dengan Malaysia. Hal ini disusul dengan pemberontakan pada 1962 oleh Partai Rakyat Brunei (PRB) yang menolak usulan tersebut. Peristiwa ini menjadi penting dalam sejarah politik Brunei. Sebab pemberontakan tersebut menimbulkan suasana tidak aman di tengah masyarakat dan menjadi dalih bagi Sultan Omar Ali untuk menetapkan peraturan-peraturan darurat. Langkah ini diambil sekaligus juga untuk menunda perubahan konstitusi dan menolak penggabungan Brunei dengan Malaysia⁵. Dengan demikian, Inggris menyadari adanya kebutuhan untuk mereformasi sistem pemerintahan menjadi pemerintahan modern dengan memperkenalkan sistem ministerial. Bagaimanapun, keinginan ini tidak kunjung terwujud hingga pada 1967 Sultan Omar Ali menyerahkan tahtanya kepada putranya, Pangeran Hassanal Bolkiah. Hal ini dilakukannya karena merasa usianya sudah lanjut dan ingin fokus beribadah saja.

Pergerakan politik internal Brunei, terutama dari PRB, mulai memperjuangkan kemerdekaan melalui Komite Dekolonisasi PBB. PRB meminta dukungan PBB bagi rakyat Brunei agar bisa menentukan nasib sendiri. Negara-negara ASEAN, kecuali Singapura, juga mendukung keinginan tersebut. Pada 7 Januari 1979, perjanjian ditetapkan antara Inggris

⁴ Hasan, Sabiha. "Brunei: The New Independent State" dalam *Pakistan Horizon*

⁵ Talib, Naimah S. 2013. "Brunei Darussalam: Kesultanan Absolut dan Negara Modern" <https://kyotoreview.org/issue-13/brunei-darussalam-kesultanan-absolut-dan-negara-modern/> diakses pada 3 Januari 2021 pukul 22:08

dengan Sultan Brunei untuk dimerdekakan pada akhir 1983. Akhirnya, pada 1 Januari 1984, deklarasi kemerdekaan Brunei dibacakan oleh Sultan Hassanal Bolkiah.

Melayu Islam Beraja

Setelah merdeka, sultan memperkenalkan konsep Melau Islam Beraja (MIB). Konsep tersebut dipromosikan agar kesetiaan rakyat pada negara meningkat. Ideologi ini menetapkan Islam sebagai agama nasional serta menjadi dasar yang penting bagi legitimasi politik sultan dan mengukuhkan keturunannya menjadi sistem pemerintahan yang relevan. Legitimasi ini juga menempatkan Sultan sebagai pelindung Islam. Bagi masyarakat Melayu, ideologi ini menjamin hak-hak mereka⁶.

Pemerintah memosisikan MIB sebagai bentuk kebangkitan tradisi sosio-politik. Konsep ini dibentuk untuk memunculkan kembali kesadaran budaya dan sejarah bangsa Brunei yang sudah terbangun sejak sekitar tujuh ratus tahun yang lalu. Seiring dengan masuknya pengaruh budaya dan pendidikan dari barat, konsep MIB diharapkan dapat mengembalikan masyarakat pada identitas bangsa mereka. MIB pada dasarnya mengukuhkan identitas Brunei sebagaimana awal mula pendirian bangsa itu sendiri⁷. Di samping itu, konsep MIB juga dianggap lebih sesuai dengan kondisi Brunei daripada konsep demokrasi ala Barat. Formulasi MIB menempatkan posisi rakyat dengan sultannya, serta berkaitan dengan Islam dan budaya Melayu⁸.

Konsep MIB pertama kali diperkenalkan tepat pada hari kemerdekaan Brunei, 1 Januari 1984. Konsep ini termaktub dalam teks proklamasi kemerdekaan Brunei yang dibacakan oleh Sultan Hassanal Bolkiah. Teks tersebut berbunyi, “Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahuwa Taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran Agama Islam menurut Ahlussunnah Waljamaah”⁹.

⁶ Talib, Naimah S. 2013. “Brunei Darussalam: Kesultanan Absolut dan Negara Modern”

⁷ Umar, Abdul Aziz. “Melayu Islam Beraja” dalam *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* Vol. 86, No. 2, Desember 2013, hal. 93

⁸ Talib, Naimah S. 2013. “Brunei Darussalam: Kesultanan Absolut dan Negara Modern”

⁹ Gunawan, Dadang, dkk. “Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai Instrumen Pencegahan Insurgensi di Brunei Darussalam” dalam *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, Vol. 4, No. 1, April 2018, hal. 104

MIB sebagai dasar negara memiliki akar sejarah yang kuat sejak berdirinya Kerajaan Brunei. Meskipun demikian, Brunei tetap menyesuaikan diri dengan konteks zaman modern. MIB ditempatkan sebagai dasar negara, seperti konsep Pancasila di Indonesia atau Rukun Negara di Malaysia. Sultan Hassanal Bolkiah juga mendirikan lembaga khusus untuk menyosialisasikan ideologi tersebut. Lembaga tersebut bernama Majelis Tertinggi Kebangsaan Melayu Islam Beraja atau MTKMIB. MTKMIB diketuai langsung oleh Menteri Pendidikan pada masa itu, Datu Abdul Aziz Umar.

Terdapat tiga landasan pokok dalam MIB, yakni Melayu, Islam, dan Beraja.¹⁰ Landasan Melayu didasari oleh Konstitusi Brunei Darussalam tahun 1957 mengenai tujuh etnis yang ada di Brunei. Etnis-etnis tersebut yakni Melayu Brunei, Melayu Bisaya, Melayu Belait, Melayu Kedayan, Melayu Dusun, Melayu Tutong, dan Melayu Murut. Masyarakat Melayu Brunei disebut rakyat Kebawah Duli, yang dengannya mereka diakui haknya dalam ideologi negara. Adapun etnis selain Melayu Brunei disebut penduduk Kebawah Duli, yang artinya mereka telah disahkan sebagai warga negara Brunei. Selanjutnya, landasan Islam mengukuhkan bahwa Brunei bukan negara sekuler. Brunei, sebagaimana disebut dalam proklamasinya, menerapkan agama Islam menurut Ahlul-sunnah Waljamaah dalam bernegara. Terakhir, landasan Beraja menunjukkan Brunei sebagai negara monarki absolut yang dipimpin oleh seorang raja. Budaya Melayu memosisikan rakyat sebagai pihak yang sudah memberikan hak memerintah secara utuh kepada raja. Namun demikian, raja juga harus melaksanakan amanah tersebut yang bukan saja diberikan oleh rakyat melainkan juga oleh Allah. Dalam perspektif adat, terdapat dua peribahasa yang berbunyi, “Raja wajib adil, rakyat wajib taat” dan “Raja tidak zalim, rakyat pantang menderhaka pada raja”¹¹. Dengan demikian, ketiga landasan tersebut dapat dimaknai secara komplementer dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Pemerintah dan Masyarakat

Sesuai dengan ideologi Melayu Islam Beraja, masyarakat Brunei didominasi oleh etnis Melayu beragama Islam. Selain menjadi agama resmi negara, pemerintah juga menaruh

¹⁰ Nasution, Syamruddin, and Suhayib Suhayib. "SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM DI BRUNAI DARUSSALAM." *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 14.1: 1-19.

¹¹Gunawan, Dadang, dkk. “Melayu Islam Beraja (MIB), h. 105-107

perhatian yang besar terhadap Islam. Pemerintah membangun masjid-masjid, mendirikan sekolah dan perguruan tinggi Islam, mengirim para pelajar untuk belajar agama ke luar negeri, serta mensubsidi biaya haji. Peraturan yang berkaitan dengan syariat Islam juga diberlakukan, seperti pelarangan minum alkohol bagi masyarakat muslim. Regulasi semacam ini mendapat dukungan dari para ulama setempat yang sejak masa tradisional telah menjadi bagian penting dalam menjalankan kebijakan Islam konservatif di negara monarki. Namun demikian, pemerintah juga berhati-hati terhadap pergerakan Islam militan yang berpotensi merusak stabilitas negara. Meskipun sebenarnya pergerakan tersebut tidak banyak di Brunei dan sangat jauh potensinya untuk dapat muncul. Hal ini didukung pula oleh para ulama setempat yang juga menentang pergerakan tersebut. Para ulama di Brunei cenderung kepada Islam moderat. Mereka lebih banyak membantu pemerintah menegakkan syariat Islam serta meningkatkan kekuatan posisi penguasa¹².

Brunei Darussalam merupakan Negara monarki absolut yang mayoritas penduduknya beretnis Melayu¹³, khususnya Melayu Brunei. Selain Melayu, etnis lain yang ada di Brunei adalah Cina, serta etnis-etnis asli seperti Kedayan, Iban, Tutong, Belait, Dusun, Bisaya, dan Murut, dan lainnya. Kekuasaan politik dimonopoli oleh etnis Barunay sebagai etnis mayoritas. Hukum Islam melalui falsafah Melayu Islam Beraja menjadi hukum yang berlaku sebagai hukum Negara. Falsafah nasional tersebut memiliki makna penerapan nilai dan budaya Melayu, baik melalui budaya, bahasa, dan kebiasaan, dengan menerapkan syariat Islam di bawah sistem monarki absolut yang mesti dihormati. Penghormatan tinggi terhadap falsafah tersebut membuat Brunei memiliki regulasi tersendiri dalam menyikapi pendatang.

Sejak abad ke-6 masehi orang-orang Cina mulai berdatangan ke Brunei. Hal ini dapat dibuktikan melalui catatan-catatan Cina klasik. Selanjutnya, imigran Cina datang lebih banyak lagi pada masa kolonialisme Inggris. Puncaknya adalah pada dekade 1960-an. Adapun suku-suku asli, seperti suku Iban, sudah lebih lama berada di Brunei sejak pemerintahan Raja Brooke.

¹² Hamzah, Abu Bakar. "Brunei Darussalam: Continuity and Tradition" dalam *Southeast Asian Affairs*, 1989, h. 96

¹³ Ghofur, Abd. "Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 7.1 (2015): 53-69.

Untuk menjadi warga negara, diberlakukan kebijakan asimilasi bagi etnis-etnis non-Melayu. Jika pelamar telah tinggal di negara itu selama 25 tahun berturut-turut di Brunei, barulah ia memenuhi syarat untuk mengikuti tes tersebut. Dengan materi seputar budaya dan bahasa Melayu, tes tertulis juga harus dilewati. Bagi etnis pendatang seperti Cina, akan lebih mudah untuk mendapat kewarganegaraan jika mereka bersedia masuk Islam. Negara memang lebih condong kepada ingin menjadikan seluruh warganya menjadi beragama Islam, meskipun kebebasan untuk menjalankan kepercayaan masing-masing tetap berlaku. Di ranah publik, ritual-ritual keagamaan selain Islam tidak boleh dilaksanakan. Pemerintah menolak izin kerja untuk pendeta asing dan mereka tidak diizinkan untuk membangun gereja¹⁴.

Stabilitas politik negara sangat bergantung pada kekuatan pemerintahannya, dengan performa ekonomi yang memainkan peran vital. Tidak seperti negara dunia ketiga lainnya, Brunei sangat sejahtera. Tidak dipungkiri bahwa kekayaan Brunei salah satunya diperoleh dari Brunei Shell Petroleum, akan tetapi jika Brunei Shell Petroleum berhenti berproduksi pun tidak lantas membuat Brunei bangkrut. Hal ini dikarenakan banyaknya investasi yang dilakukan orang-orang Brunei di luar negeri untuk menopang perekonomian mereka. Masyarakat Brunei dapat menikmati berbagai kemudahan hidup di negaranya, seperti pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, kemudahan pinjaman kredit rumah, dan subsidi bahan makanan. Tidak ada pengangguran dan bahkan tidak ada orang yang bersusah payah mencari pekerjaan, melainkan mencari jenis pekerjaan yang sesuai keinginan dan tepat untuk dilakukan seseorang¹⁵.

Masyarakat Brunei memiliki sistem sosial yang mengacu kepada status kebangsawanan dan etnis. Seorang bangsawan dan keturunannya tentu menempati status sosial yang lebih tinggi. Begitu juga etnis Melayu Brunei menempati posisi yang lebih tinggi daripada etnis lainnya. Brown berpendapat bahwa sistem ini pada dasarnya merupakan peninggalan pengaruh Hindu dengan beberapa modifikasi agar sesuai dengan Islam. Terdapat tujuh kelas sosial dalam sistem ini. Dua kelas tertinggi yang ditempati oleh bangsawan etnis Melayu Brunei ialah raja-raja bataras (*core nobility*) yang ditempati oleh sultan dan para wazir dan raja-raja

¹⁴ Facts and Details. 2015. "Minorities In Brunei" http://factsanddetails.com/southeast-asia/Brunei/sub5_10b/entry-3610.html

¹⁵ Hamzah, Abu Bakar. "Brunei Darussalam: Continuity and Tradition, h. 96

pengiran (*nobility*) yang ditemati oleh cheteria. Selanjutnya terdapat tiga kelas untuk etnis Melayu Brunei non-bangsawan, yakni ampuan-ampuan (*'doubtful nobility'*), awang-awang (*aristocrats*), ra'ayat (*commoners*). Adapun untuk etnis selain Melayu Brunei, terdapat kelas sakai (*subjects, followers*), dan hamba /dulun (*servants/dependants, slaves*). Kelas-kelas ini menjadi pembeda antara Melayu Brunei dengan etnis Melayu lainnya di Brunei, meskipun sama-sama Melayu dan sama-sama beragama Islam ¹⁶.

PENUTUP

Kesimpulan

Perjalanan panjang sejarah Brunei sebagai sebuah negara telah banyak mempengaruhi identitas nasionalnya. Menariknya, Brunei berhasil untuk tetap melestarikan nilai-nilai tradisional Melayu dan Islam konservatif dengan tetap memperhatikan konteks zaman. Hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintahan monarki absolut yang berkuasa penuh atas negara, berikut penetapan identitas nasionalnya. Melayu dan Islam ditetapkan sebagai identitas negara oleh sultan. Pada perjalanannya, memang tidak hanya orang Melayu Brunei atau orang Islam saja yang menjadi rakyat negara tersebut. Menanggapi hal tersebut, negara telah menetapkan penyesuaian seperti diadakannya ujian kewarganegaraan dengan kemudahan bagi mereka yang beragama Islam. Bagi masyarakat kosmopolitan, perlakuan ini boleh jadi dianggap diskriminatif. Bagaimanapun, langkah ini nyatanya tetap diberlakukan dan terbukti dapat menjaga kestabilan negara, baik secara politik maupun ekonomi. Perjalanan panjang sejarah Brunei sebagai sebuah negara telah banyak mempengaruhi identitas nasionalnya. Menariknya, Brunei berhasil untuk tetap melestarikan nilai-nilai tradisional Melayu dan Islam konservatif dengan tetap memperhatikan konteks zaman. Hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintahan monarki absolut yang berkuasa penuh atas negara, berikut penetapan identitas nasionalnya. Melayu dan Islam ditetapkan sebagai identitas negara oleh sultan. Pada perjalanannya, memang tidak hanya orang Melayu Brunei atau orang Islam saja yang menjadi rakyat negara tersebut. Menanggapi hal tersebut, negara telah menetapkan penyesuaian seperti diadakannya ujian kewarganegaraan dengan kemudahan bagi mereka yang beragama Islam. Bagi masyarakat

¹⁶ King, Victor T. "What is Brunei society? Reflections on a conceptual and ethnographic issue" dalam *South East Asia Research*, Vol. 2, No.2, September 1994, hal. 181-183

kosmopolitan, perlakuan ini boleh jadi dianggap diskriminatif. Bagaimanapun, langkah ini nyatanya tetap diberlakukan dan terbukti dapat menjaga kestabilan negara, baik secara politik maupun ekonomi.

DAFTAR RUJUKAN

- Brown, David. 1996. *The State and Ethnic Politics in South East Asia*. London: Routledge.
- Ghofur, Abd. "Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis)." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 7.1 (2015): 53-69.
- Gunawan, Dadang, dkk. "Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai Instrumen Pencegahan Insurgensi di Brunei Darussalam" dalam *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, Vol. 4, No. 1, April 2018
- Hamzah, Abu Bakar. "Brunei Darussalam: Continuity and Tradition" dalam *Southeast Asian Affairs*, 1989.
- Hasan, Sabiha. "Brunei: The New Independent State" dalam *Pakistan Horizon*, Vol. 37, No. 2, Second Quarter, 1984.
- Hays, Jeffrey. 2015. "Minorities In Brunei" http://factsanddetails.com/southeast-asia/Brunei/sub5_10b/entry-3610.html
- King, Victor T. "What is Brunei society? Reflections on a conceptual and ethnographic issue" dalam *South East Asia Research*, Vol. 2, No.2, September 1994.
- Maymunah, Jihan, and Asep Yudha Wirajaya. "UNSUR-UNSUR HISTORIOGRAFI TRADISIONAL ISLAM DALAM TEKS SALSILAH KETURUNAN RAJA-RAJA BRUNEI DAN SISTEM PEMERINTAHAN BRUNEI SAAT INI." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 4.2 (2020)
- Nasution, Syamruddin, and Suhayib Suhayib. "SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM DI BRUNAI DARUSSALAM." *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 14.1: 1-19.
- Talib, Naimah S. 2013. "Brunei Darussalam: Kesultanan Absolut dan Negara Modern" <https://kyotoreview.org/issue-13/brunei-darussalam-kesultanan-absolut-dan-negara-modern/>
- Umar, Abdul Aziz. "Melayu Islam Beraja" dalam *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 86, No. 2, Desember 2013.